



Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
2026

KATA PENGANTAR

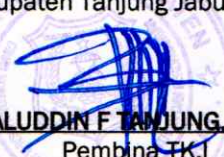
Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan RahmatNya penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan acuan perencanaan kegiatan Tahunan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan penjabaran per tahun dari Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 serta merujuk pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026. Adapun penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan, semoga penyusunan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pembangunan di Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Februari 2026

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


SAWALUDDIN F. TANJUNG, SE. M.S.I

Pembina TK.I

NIP. 19780506 201101 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Landasan hukum	2
1.3. Maksud dan tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.....	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.....	27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	50
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	68
 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan.....	73
3.2. Program dan Kegiatan.....	74
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	86
 BAB V PENUTUP	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan mempunyai peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah dalam menuju suatu titik yakni kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa tahapan sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Tahunan. Demi menjaga keserasian dan sinergitas pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya.

Dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan dan pencapaian rencana pembangunan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berfungsi sebagai rencana jangka menengah SKPD yang mengacu pada RPJMD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik kedalam rencana tahunan SKPD yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada RKPD Kabupaten.

Renja berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini merupakan dokumen komprehensif

berwawasan 1 (satu) tahun. Dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan.

Rencana Kerja (RENJA) ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Tahun 2026 dengan fokus utama pelayanan adalah menggerakkan ekonomi rakyat, percepatan pembangunan, peningkatan produktifitas dan kesejahteraan rakyat dalam kerangka kehidupan masyarakat yang berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 RPJP Nasional 2005 – 2025.
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 RPJM Nasional 2010 – 2014.
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil
12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 15. Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 12).
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
 18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 57)
 19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kebijakan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian pembangunan bidang koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat;
3. Merumuskan Rencana Program dan Kegiatan tahun 2026 beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan;
4. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 disusun sebagai berikut :

BAB	I	PENDAHULUAN
		1.1 Latar Belakang
		1.2 Landasan Hukum
		1.3 Maksud dan Tujuan
		1.4 Sistematika Penulisan
BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
		2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
		2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
		2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja SKPD
		2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB	III	TUJUAN DAN SASARAN
		3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
		3.2 Program dan Kegiatan SKPD
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
		4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan
BAB	V	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja ditinjau dari pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024

No	URAIAN		Sudah/Belum mencapai target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	Kegiatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Tercapai
	Anggaran	Rp. 45.666.000,-	
	Realisasi	Rp. 40.616.000,-	
	Persentase capaian kinerja	88.94%	
	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapai
	Anggaran	Rp. 3.105.762.202,-	
	Realisasi	Rp. 2.881.447.312,-	
	Persentase capaian kinerja	92.78%	
	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tercapai
	Anggaran	Rp. 208.920.000,-	
	Realisasi	Rp. 202.920,-	
	Persentase capaian kinerja	97.13%	
	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tercapai
	Anggaran	Rp. 84.050.000,-	
	Realisasi	Rp. 78.050.000,-	
	Persentase capaian kinerja	92.86%	
	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapai
	Anggaran	Rp. 5.737.000,-	
	Realisasi	Rp. 5.628.500,-	
	Persentase capaian kinerja	98.11%	
	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapai
	Anggaran	Rp. 46.206.000,-	
	Realisasi	Rp. 45.655.550,-	
	Persentase capaian kinerja	98.81%	
	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercapai
	Anggaran	Rp. 11.400.000,-	
	Realisasi	Rp. 10.400.000,-	
	Persentase capaian kinerja	91.23%	

No	URAIAN		Sudah/Belum mencapai target
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 16.774.800,- Rp. 13.723.600,- 81.81%	Tercapai
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 14.500.000,- Rp. 12.960.000,- 89.38%	Tercapai
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 745.266.900,- Rp. 737.761.765,- 98.99%	Tercapai
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 1.750.000,- Rp. 1.610.000,- 92%	Tercapai
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 134.000.000,- Rp. 83.183.649,- 62.08%	Tercapai
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 99.604.000,- Rp. 99.570.000,- 99.97%	Tercapai
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 471.615.000,- Rp. 470.000.000,- 99.96%	Tercapai
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 313.178.700,- Rp. 313.150.000,- 99.99%	Tercapai
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 279.279.700,- Rp. 207.821.390,- 74.41%	Tercapai
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Rp. 15.160.000,- Rp. 14.865.000,- 98.05%	Tercapai
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 5.177.500,- Rp. 5.117.500,- 100%	Tercapai
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Rp. 17.100.000,- Rp. 14.980.000,- 87.6%	Tercapai
No	URAIAN		Sudah/Belum mencapai target

	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Rp. 57.925.000,- Rp. 52.000.000,- 89.77%	Tercapai
3.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Rp. 19.300.000,- Rp. 15.800.000,- 81.87%	Tercapai
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Rp. 17.600.000,- Rp. 16.626.200,- 94.47%	Tercapai
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 142.208.750,- Rp. 126.831.698,- 89.19%	Tercapai
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendanaan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguataan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Rp. 16.270.000,- Rp. 15.270.000,- 93.85%	Tercapai
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendanaan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguataan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Rp. 65.001.500,- Rp. 44.998.000,- 69.23%	Tercapai
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendanaan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguataan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp. 51.936.800,- Rp. 51.661.800,- 99.47%	Tercapai
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendanaan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguataan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Rp. 188.529.300,- Rp. 168.554.300,- 89.4%	Tercapai
No	URAIAN		Sudah/Belum mencapai target

7.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Rp. 357.350.000,- Rp. 357.114.850,- 99.93%	Tercapai
8.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Menjamin Ketersediaan Barang/Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan Pasar Rakyat Rp. 1.301.199.800,- Rp. 16.950.000,- 1.3%	Belum Tercapai
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Rp. 21.400.000,- Rp. 14.400.000,- 67.29%	Tercapai
9.	Program Pengembangan Ekspor		
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pameran Dagang Lokal Rp. 198.747.500,- Rp. 179.494.263,- 90.31%	Tercapai
10.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Rp. 78.130.000,- Rp. 65.970.000,- 84.44%	Tercapai
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Rp. 26.850.000,- Rp. 22.800.000,- 84.92%	Tercapai
11.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Rp. 73.370.000,- Rp. 73.370.000,- 100%	Tercapai
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Rp. 218.690.000,- Rp. 217.625.800,- 99.51%	Tercapai
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Rp. 387.015.600,- Rp. 381.697.332,- 98.63%	Tercapai
	Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase capaian kinerja	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Rp. 70.705.200,- Rp. 67.705.200,- 95.76%	Tercapai

No	URAIAN		Sudah/Belum mencapai target
12.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		
	Kegiatan	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapai
	Sub Kegiatan	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	
	Anggaran	Rp. 17.680.000,-	
	Realisasi	Rp. 17.480.000,-	
	Persentase capaian kinerja	98.87%	
	Kegiatan	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapai
	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analis Data Industri Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
	Anggaran	Rp. 33.004.400,-	
	Realisasi	Rp. 31.504.400,-	
	Persentase capaian kinerja	95.46%	

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 secara umum sudah terlaksana dengan baik dan tepat waktu, bahkan ada yang melebihi dari target capaian kinerja. Namun dari 12 Program terdapat 1 Sub Kegiatan yang masih dibawah 60% atau belum mencapai target kinerjanya, yaitu :

Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang/Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan Pasar Rakyat, hanya mencapai target kinerja 1.3%. Hal ini dikarenakan terkendalanya proses pembuatan perbup yang belum terselesaikan sampai dengan triwulan ke empat sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 2.1.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan s/d Tahun 2024 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan yang patuh terhadap Perundang-undangan	100%	100%	100%			100%		
2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Kepatuhan Koperasi	100%	100%	100%			100%		
2	17	03	2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diawasi	268 Koperasi	185 Koperasi	268 Koperasi	170 Koperasi	63,43%	268 Koperasi		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	03	2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	268 Koperasi	264 Koperasi	268 Koperasi	170 Koperasi	63,43%	268 Koperasi		
2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya	100%	68,35%	100%			100%		
2	17	04	2.01	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP	100%	68,35	100%			100%		
2	17	04	2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya	79 Koperasi	116 Koperasi	79 Koperasi	79 Koperasi	100%	79 Koperasi		
2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mendapat pelatihan	100%	22,38%	86 Orang			86 Orang		
2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya pelatihan bagi koperasi	100%	22,38%	60 orang			60 orang		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	05	2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus/ pengelola dan pengawas koperasi yang dilatih	515 orang	136 orang	60 orang	88 orang	146,6%	60 orang		
2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Koperasi aktif	81,37%	5,60%	3%			4,50%		
2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya persentase koperasi aktif	81,37%	5,60%	3%			4,50%		
2	17	06	2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah peningkatan koperasi aktif - Umlah Koperasi yang mendapat bantuan pendanaan	- 218 Koperasi - 125 Koperasi	17 Koperasi	33 Koperasi	107 Koperasi	324,2%	37 Koperasi		
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan UMKM	9.580 Unit Usaha	200 Unit Usaha	2,40%			2,40%		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendanaan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguataan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan Jumlah UMKM	9.580 Unit usaha	200 Unit usaha	2,40%			2,40%		
2	17	07	2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang bermitra	210 Unit usaha	20 Unit usaha	10 Unit usaha	8 Unit usaha	80%	10 Unit usaha		
2	17	07	2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	- Jumlah Kelembagaan Kelompok Usaha yang dibentuk - Jumlah Pelatihan yang terlaksana	120 Kelompok/ 600 UMKM	44 Kelompok/ 60 UMKM	16 Kelompok/ 80 UMKM	11 Kelompok, 55 UMKM	68,75%	16 Kelompok/ 80 UMKM		
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	1.275 Usaha	1.048 Usaha	3,33%			3,33%		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase Tercapainya Peningkatan Usaha Mikro	1.275 Usaha mikro	35 Usaha mikro	3,33%			3,33%		
2	17	08	2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Peningkatan Usaha Mikro	1.275 Usaha mikro	35 Usaha mikro	35 Usaha Mikro	2 Usaha kecil	5,71%	35 Usaha Mikro		
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar yang layak dan berfungsi	44,46%	2,78%	4,17%			4,17%		
3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pelaksanaan pembangunan dan Rehabilitasi pasar	44,46%	2,78%	4,17%			4,17%		
3	30	03	2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembangunan dan rehab pasar	36 Pasar	4 Pasar	14 unit	0 unit	0%	4 Unit		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	03	2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pelaksanaan Pembinaan, dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	83,28% dan 37,47%	2,77%	13,88% dan 6,94%			13,88% dan 6,94%		
3	30	03	2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang ditata dan diawasi	80 Pasar	10 Pasar	10 pasar	8 pasar	80%	10 Pasar		
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terwujudnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	18 Jenis Barang	18 Jenis Barang	18 Jenis Barang			18 Jenis Barang		
3	30	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan barang kebutuhan pokok dan Barang kebutuhan penting lainnya	18 Jenis Barang	18 Jenis Barang	18 Jenis Barang			18 Jenis Barang		
3	30	04	2.02.01	Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya yang diawasi	18 Jenis Barang	18 Jenis Barang	18 Jenis Barang	18 jenis barang	100%	18 Jenis Barang		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	06		ROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah berlaku	3.458 unit	134 unit	36,82%			45,49%		
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	3.458 unit	134 unit	36,82%			45,49%		
3	30	06	2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	- Jumlah UTTP yang telah ditera, tera ulang dan verifikasi standar eksternal - Jumlah pembangunan sarana dan prasarana	3.458 unit	134 unit	850 unit	241 unit	28,35%	1050 unit		
3	30	06	2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan dan penyuluhan Metrologi legal dan tertib niaga	73 kali	5 kali	6 kali	8 kali	134%	8 kali		
3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil	1.677 IK	1.420 IK	2,82%			2,82%		
3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	1.677 IK	1.420 IK	2,82%			2,82%		
3	31	02	2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peningkatan Industri Kecil dan Sentra Industri Kecil	1.660 Kelompok IK dan 15 Sentra	245 IK	40 IK dan 1 Sentra	151 IK	251%	40 IK dan 1 Sentra		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	31	02	2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Sarana dan Prasarana Industri Kecil	116 IK dan 15 Sentra	101 IK	7 IK	24 IK	342,85%	7 IK dan 1 unit sentra		
3	31	02	2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Peningkatan Industri Kecil	1.660 IK	265 IK	40 IK	58 IK	145%	40 IK		
3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase industri yang memiliki izin	52 Industri menengah besar	3 Industri Menengah Besar	10,34%			10,34%		
3	31	03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas penerbitan izin industri	52 Industri menengah besar	3 Industri Menengah Besar	10,34%			10,34%		
3	31	03	2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI, dan IPIKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Industri yang memiliki IUI	47 Industri menengah besar	3 Industri menengah besar	3 IMB	3 IMB	100%	3 IMB		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Mengukur ketersediaan Informasi Industri secara lengkap dan terkini	1.707 IKMB/50 Buku Profil	43 IKMB/30 Profil	43 IKMB/30 Profil			43 IKMB/10 Profil		
3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi Industri	1.707 IKMB/50 Buku Profil	43 IKMB/30 Profil	43 IKMB/30 Profil			43 IKMB/10 Profil		
3	31	04	2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Profil Industri	50 Buku Profil 3.000 Leaflet 3.000 Paper bag	30 Profil IKM	10 Profil IKM	10 Profil IKM	100%	10 buku profil IKM 500 Leaflet 500 Paper bag		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Renja tahun 2024 merupakan tahun ke empat perencanaan pada Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026. Prioritas pencapaian sasaran pembangunan daerah disusun secara seksama mengingat banyaknya program yang harus dijalankan dengan keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah.

Kinerja pelayanan yang dikedepankan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola bidang koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai target dan realisasi kinerja pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 belum dapat dianalisis. Pembahasan mengenai hal-hal tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rancangan Renja selanjutnya.

Terkait sektor Pemberdayaan Koperasi, perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2017 berjumlah 368 koperasi, yang terdiri dari 133 koperasi aktif dan 236 koperasi tidak aktif. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pembubaran koperasi tidak aktif sebanyak 116 koperasi, sehingga terjadi penurunan jumlah koperasi. Pada tahun 2020 jumlah koperasi sebanyak 268 koperasi yang terdiri dari koperasi aktif sebanyak 151 koperasi dan koperasi tidak aktif sebanyak 117 koperasi, tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah koperasi sebanyak 6 koperasi dari 268 koperasi menjadi 274 koperasi yang terdiri dari koperasi aktif sebanyak 159 koperasi dan koperasi tidak aktif sebanyak 115 koperasi. Pada tahun 2022 jumlah koperasi bertambah 1 koperasi sehingga menjadi 275 koperasi. Pada tahun 2023 jumlah koperasi menjadi 285 koperasi dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 300 koperasi, Dimana koperasi aktif berjumlah 185 koperasi dan koperasi tidak aktif berjumlah 115 koperasi. Jumlah Koperasi aktif dan tidak aktif serta penyebarannya pada Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Data Perkembangan Koperasi
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017-2024

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Koperasi Aktif	133	145	149	151	159	160	170	185
2	Koperasi tidak aktif	236	238	119	117	115	115	115	115
Jumlah		368	369	383	268	274	275	285	300

Jumlah Koperasi Aktif maupun Koperasi tidak aktif menurut Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.2
Jumlah Koperasi menurut Kecamatan
dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Koperasi Aktif (unit)	Koperasi Tidak Aktif (unit)	Total (unit)
1	2	3	4	5
1	Tungkal Ulu	16	2	18
2	Tungkal Ilir	69	36	105
3	Pengabuan	3	8	11
4	Kuala Betara	4	3	7
5	Merlung	11	2	13
6	Tebing Tinggi	25	21	46
7	Batang Asam	14	8	22
8	Rendah Mendaluh	7	14	21
9	Muara Papalik	14	5	19
10	Bram Itam	4	3	7
11	Betara	9	7	16
12	Senyerang	8	6	14
13	Seberang Kota	-	-	-
JUMLAH		185	115	300

Jumlah KUD dan Non KUD menurut Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.3
Jumlah KUD dan Non KUD Menurut Kecamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Koperasi		Aktif		Tidak Aktif		Jumlah Anggota	
		KUD	NON KUD	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD
1.	Tungkal Ulu	3	15	3	13	0	2	429	2.940
2.	Merlung	5	8	5	6	0	2	2.462	1.204
3.	Batang Asam	4	18	2	12	2	6	1.874	2.592
4.	Tebing Tinggi	6	40	4	21	2	19	2.819	3.237
5.	Renah Mendaluh	3	18	2	5	1	13	1.228	580
6.	Muara Papalik	4	15	4	10	0	5	1.686	497
7.	Pengabuan	2	9	0	3	2	6	320	193
8.	Senyerang	4	10	2	6	2	4	267	2.252
9.	Tungkal Ilir	1	104	1	68	0	36	47	8.099
10.	Bram Itam	0	7	0	4	0	3	0	313
11.	Seberang Kota	0	1	0	1	0	0	0	0
12.	Betara	1	15	0	9	1	6	75	861
13.	Kuala Betara	1	7	1	4	0	3	48	197
JUMLAH		34	267	24	162	10	105	11.255	22.965

Seperti tampak pada tabel di atas, pada tahun 2024 jumlah koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 300 koperasi, yang terdiri dari 34 KUD dan 267 Non KUD. Dari jumlah tersebut hanya 162 koperasi yang aktif. Di dalamnya terlibat 22.965 anggota koperasi.

Tabel 2.2.4
Jumlah KUD Berdasarkan Permodalan
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KUD	SIMPANAN (Rp.000)	PERMODALAN (Rp.000)	VOLUME USAHA (Rp.000)	SHU (Rp.000)
1	Tungkal Ulu	3	1.973.874.550	2.936.928.929	194.546.005.608	278.324.818
2	Merlung	5	12.242.112.258	17.498.239.640	31.033.212.673	612.642.477
3	Batang Asam	4	809.313.534	3.862.239.068	14.902.906.801	199.454.235
4	Tebing Tinggi	6	7.286.879.759	15.125.707.717	55.411.898.965	592.384.251
5	Renah Mendaluh	3	3.323.703.557	8.519.145.340	48.728.012.610	77.350.437
6	Muara Papalik	4	538.561.593	1.115.853.139	9.283.406.676	51.803.194
7	Pengabuan	2	893.566.000	893.566.000	-	-
8	Senyerang	4	57.731.500	1.057.731.500	119.264.000	14.496.054
9	Tungkal Ilir	1	10.777.100	114.599.100	-	-
10	Bram Itam	0	-	-	-	-
11	Seberang Kota	0	-	-	-	-
12	Betara	1	86.245.000	86.345.000	-	-
13	Kuala Betara	1	55.220,000	72.050,000	90.982.000	1.000,00
	JUMLAH	34	27.277.984.851	51.282.405.433	354.115.689.333	1.827.455.466

Terlihat pada tabel di atas, bahwa di Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota tidak terdapat KUD berdasarkan permodalan. Dan masih ada beberapa KUD di Kecamatan yang belum ada data volume usaha dan SHU seperti di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Betara.

Tabel 2.2.5
Jumlah Koperasi Non KUD Berdasarkan Permodalan
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

NO	KECAMATAN	NON KUD	SIMPANAN	PERMODALAN	VOLUME USAHA	SHU
1	Tungkal Ulu	15	2.313.130.642	5.925.654.032	8.605.991.340	88.685.162
2	Merlung	7	6.289.649.807	17.741.671.645	24.886.445.512	417.501.402
3	Batang Asam	14	5.086.890.244	7.942.058.670	41.736.291.871	816.663.938
4	Tebing Tinggi	38	15.213.461.478	30.966.735.463	41.827.651.384	1.670.781.089
5	Renah Mendaluh	17	559.522.500	715.452.500	774.252.000	69.895.650
6	Muara Papalik	14	617.491.190	646.552.014	543.348.788	60.965.971
7	Pengabuan	8	238.715.000	488.715.000	121.050.000	23.685.000
8	Senyerang	9	7.714.311.685	8.182.755.636	15.919.847.538	1.420.794.185
9	Tungkal Ilir	102	15.004.840.607	18.913.407.193	8.517.774.824	186.064.271
10	Bram Itam	7	394.039.539	437.268.604	931.593.917	144.925.954
11	Seberang Kota	-	-	-	-	-
12	Betara	15	86.245.000	1.704.296.165	477.694.000	18.489.524
13	Kuala Betara	5	55.220.000	76.945.000	864.000.000	4.300,000
	JUMLAH	251	53.573.517.692	93.741.511.922	145.205.941.174	4.922.752.147

Jumlah Koperasi Non KUD berdasarkan permodalan pada tahun 2024 sebanyak 251 koperasi dapat dilihat jumlah simpanan, permodalan, volume usaha dan SHU pada tiap Kecamatan. Sedangkan di Kecamatan Seberang Kota tidak terdapat Koperasi Non KUD.

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah koperasi aktif masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah koperasi tidak aktif. Namun demikian masih adanya beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Terbatasnya atau kurangnya Tenaga Teknis, Pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Kurangnya Tenaga Administrasi atau Tenaga Teknis pada Koperasi/KUD yang ada di Desa ataupun Kecamatan.
3. Kurangnya Modal Usaha yang dikelola oleh Koperasi/KUD untuk meningkatkan usahanya.
4. Tidak tersedianya sumber Daya Manusia yang memadai atau handal pada Koperasi/KUD yang dibentuk.

- 5. Kurangnya pengetahuan tentang Administrasi Keuangan bagi Pengurus Koperasi/KUD.
- 6. Kurang Transparannya dalam pengelolaan Keuangan Koperasi/KUD sehingga Anggota menjadi kurang Percaya kepada Pengurus.

Solusi :

- a. Penyediaan penguatan modal melalui dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tingkat suku bunga yang rendah
- b. Memfasilitasi akses permodalan dari perbankan dan Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) dari Kementerian Koperasi dan UKM.
- c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh koperasi itu sendiri.

Terkait sektor UMKM, perkembangan jumlah UMKM Per Bidang Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2020-2024 sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.6
Data Perkembangan UMKM Per Bidang Usaha
Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Bidang Pertanian	1.658	1.674	1.674	1.686	1.686
2	Bidang Perdagangan	5.001	5.093	5.213	5.286	5.408
3	Bidang Industri	1.420	1.471	1.521	1.521	1.568
4	Bidang Aneka Usaha	231	260	290	290	321
	Jumlah UMKM	8.310	8.498	8.698	8.783	8.983
	Daya serap tenaga kerja (orang)	10.268	10.501	10.806	10.896	11.195

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Jumlah UMKM tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 jumlah sebanyak 8.310 UMKM, tahun 2021 sebanyak 8.498 UMKM dan tahun 2022 menjadi 8.698 UMKM, tahun 2023 menjadi 8.783 dan tahun 2024 menjadi 8.983

sehingga terjadi peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 673 UMKM (8.09%).

Sedangkan untuk perkembangan tenaga kerja yang dapat diserap oleh UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2020–2024 juga meningkat, dimana jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM pada tahun 2020 sebanyak 10.268 orang, tahun 2021 menjadi 10.501 orang, tahun 2022 menjadi 8.698 orang, tahun 2023 menjadi 10.896 orang dan pada akhir tahun 2024 menjadi sebanyak 11.195 orang, sehingga terjadi peningkatan tenaga kerja dari tahun 2020-2024 sebanyak 927 orang (9.02%).

Terkait Sektor Industri, Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.2.7
Perkembangan Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020-2024

Tahun	INDUSTRI KECIL			INDUSTRI MENENGAH		
	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (jutaan Rp)	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (jutaan Rp)
2020	1.420	3.564	196.715	6	564	335.431
2021	1.495	3.770	196.715	6	564	335.431
2022	1.725	3.805	226.297	6	564	335.431
2023	1.812	4.230	255.326	6	564	335.431
2024	2.051	4.788	290.368	6	564	335.431

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Jumlah Industri Kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 sebanyak 1.420 unit usaha. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebanyak 2.051 unit usaha, terjadi peningkatan Industri Kecil sebanyak 631 unit usaha atau sebesar 44.43%. Sedangkan jumlah tenaga kerja pada tahun 2020 sebanyak 3.564 orang, dan jika dibandingkan dengan tahun 2024 jumlah tenaga kerja sebanyak 4.788 orang maka terjadi peningkatan tenaga kerja sebanyak 1.224 orang atau meningkat 34.34%.

Kendala yang dihadapi :

- Kendala Bidang Industri
 - a. Belum adanya tenaga tekhnis penyuluh industri sehingga dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan industri khususnya Industri Kecil dan kerajinan masih belum terlaksana secara merata dan optimal.

- b. Masih kurangnya wawasan pengrajin dan calon pengrajin khususnya industri kecil dalam mengelola usahanya.
- c. Promosi produk dan pasar masih kurang.

Solusi :

- Bidang Industri
 - a. Perlu adanya tenaga teknis penyuluh industri.
 - b. Perlu ditingkatkan pelatihan teknis dan manajemen bagi pelaku usaha industri sehingga kedepannya dalam mengelola usaha akan lebih baik dan berkembang.
 - c. Perlunya terobosan peluang usaha yang lebih luas, tidak hanya melalui promosi (pameran), akan tetapi juga melalui media sosial, selain biayanya lebih rendah, jangkauannya lebih luas, serta support pemerintah dalam hal sarana dan prasarana IKM.

Usaha di sektor perdagangan dan sektor pendukung lainnya merupakan program yang diprioritaskan dan mempunyai arti strategis. Perkembangan nilai ekspor Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.2.8
 Perkembangan Nilai Ekspor
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2024

Tahun	Volume (Ton)	Nilai Ekspor (US \$)
2020	3.097.350,85	173.793.478,980
2021	391.844,223	94.475.573,39
2022	1.496.476.784	45.047.192.213
2023	4.531.457.540	103.256.219.905
2024	6.995.054,92	101.118.223.150

Dalam bidang perdagangan perkembangan nilai ekspor menjadi sangat penting, karena nilai ekspor merupakan salah satu tolok ukur kinerja dalam bidang perdagangan. Pada tabel diatas nilai ekspor pada tahun 2020 sebesar US\$ 173.793.478,98 tahun 2021 sebesar US\$ 94.475.573,390, tahun 2022 sebesar US\$ 45.047.192.213, tahun 2023 sebesar US\$ 103.256.219.905, tahun 2024 US\$ 101.118.223.150 Jika dilihat perkembangan nilai ekspor dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2020-

2024 mengalami peningkatan dan penurunan, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya beberapa perusahaan eksportir yang tidak beroperasi lagi
- b. Adanya eksportir yang melakukan ekspor melalui daerah lain.
- c. Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya aktifitas ekspor keluar negeri.
- d. Tingkat kesadaran eksportir dalam penyampaian laporan masih rendah sehingga sulit untuk memantau perkembangan ekspornya, ditambah lagi kewenangan terkait ekspor dan impor sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Perdagangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup berkembang, setidaknya telah muncul beberapa mini market, swalayan dan pertokoan di beberapa kecamatan. Pasar tradisional yang sudah ada terus berkembang. Perkembangan Pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.9
Keadaan Pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah pasar (Unit)	Kondisi (Unit)			Jenis Pasar (Unit)		Kepemilikan (Unit)		
			Baik	Sedang	Kurang	Mingguan	Harian	Masy.	Pemda	Desa
1	Tungkal Ilir	9	4	4	1	1	9	5	4	-
2	Bram Itam	6	4	-	2	6	6	5	-	1
3	Betara	7	2	1	4	7	7	1	2	4
4	Merlung	5	3	-	2	5	5	-	1	4
5	Senyerang	6	1	-	5	6	6	2	1	3
6	Tungkal Ulu	3	-	1	2	3	3	1	1	1
7	Batang Asam	6	1	1	4	6	6	1	-	5
8	Muara Papalik	6	3	1	2	6	6	1	1	4
9	Tebing Tinggi	7	5	1	1	3	7	1	1	4
10	Seberang Kota	5	-	1	3	5	5	-	-	5
11	Renah Mendaluh	6	2	1	3	6	6	-	1	5
12	Pengabuan	7	1	-	4	7	7	-	3	4
13	Kuala Betara	5	-	2	2	5	5	-	-	5
Jumlah		78	26	13	35	66	78	17	15	45

Jumlah Pasar yang tersebar di 13 Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2024 sebanyak 78 unit pasar, dengan kondisi baik sebanyak 26 unit pasar, kondisi sedang sebanyak 13 unit pasar dan kondisi kurang baik atau rusak berat sebanyak 35 unit pasar. Kepemilikan pasar yaitu kepemilikan masyarakat sebanyak 19 unit pasar, Pemerintah Daerah sebanyak 15 unit pasar dan kepemilikan Desa sebanyak 45 unit pasar.

Kendala yang dihadapi :

- Kendala Bidang Perdagangan
 - a. Masih terdapat komoditi ekspor kita yang keluar dan tercatat di daerah lain.
 - b. Tingkat kesadaran penyampaian laporan oleh eksportir dan distributor masih rendah.
 - c. Terbatasnya kewenangan daerah terhadap penanganan ekspor dan impor.

Solusi :

- Bidang Perdagangan
 - a. Perlu adanya pelabuhan ekspor impor di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - b. Perlu adanya forum komunikasi peningkatan ekspor Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi aparatur Negara dengan pelaku usaha/pengusaha serta menampung segala aspirasi, keluhan, kendala dan hambatan yang dihadapi para pelaku usaha dibidang ekspor dan impor.
 - c. Peninjauan kembali terhadap Undang-undang atau peraturan yang mengatur ekspor impor, terutama yang mengatur kewenangan daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada BAB XIV Pasal 307 ayat (1) menyatakan bahwa “Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” dan ayat (2) menyatakan bahwa “Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, pada Pasal 308 menyatakan bahwa “Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.”

Pada Pasal 309 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, serta perdagangan dan pasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, serta perdagangan dan pasar;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, serta perdagangan dan pasar;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, serta perdagangan dan pasar; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Pasal 310, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipimpin oleh Kepala Dinas dan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas:

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah, dengan tugas, yaitu:

- a. Merumuskan program kegiatan bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya proses kegiatan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar dengan lancar;
- b. Mengkoordinasikan kebijakan dan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar;
- c. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir bawahan;
- d. Mengarahkan kegiatan pelaksanaan tugas bawahan agar berjalan sesuai ketentuan yang efektif dan efisien;

- e. Melakukan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- g. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai alat pengambilan kebijakan agar dapat dipedomankan untuk masa yang akan datang; dan
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat serta kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan dan urusan keuangan meliputi perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

I.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

I.2 Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;

- d. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

III. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana program, kebijakan dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, membina serta evaluasi di bidang koperasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja Bidang Koperasi;
- b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi bimbingan, pembinaan, pengawasan kelembagaan dan pengelolaan, penilaian, perizinan usaha, pemeriksaan, kerja sama koperasi dan usaha simpan pinjam;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, bimbingan kelembagaan, akses permodalan, penyuluhan, pengawasan dan pembinaan, pemberian advokasi, pendirian, penggabungan / peleburan dan pembubaran koperasi;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, kemitraan koperasi dengan pelaku usaha, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, magang, studi banding, penyuluhan perkoperasian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

III.1 Kepala Bidang

Kepala Bidang Koperasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Merencanakan program kegiatan di Bidang Koperasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya proses kegiatan Bidang Koperasi dapat berjalan lancar;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Kasi di lingkup Bidang Koperasi secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bagian;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bagian masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- h. Mengendalikan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka koordinasi di Bidang Koperasi agar berjalan dengan lancar;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bidang Koperasi;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana program, kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja Bidang Usaha Mikro;

- b. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan, evaluasi peluang, pola kemitraan dan jaringan usaha, fasilitasi perizinan usaha, pendataan usaha mikro dan promosi produk usaha mikro;
- c. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan, evaluasi inventarisasi kegiatan kewirausahaan, pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha mikro;
- d. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan, evaluasi identifikasi potensi usaha dan sentra usaha mikro dan fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Pelaksanaan kebijakan dan iklim usaha yang kondusif dan pembinaan kelembagaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

IV.1 Kepala Bidang

Kepala Bidang Usaha Mikro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Merencanakan Program kegiatan di Bidang Usaha Mikro berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya proses kegiatan Bidang Usaha Mikro dapat berjalan lancar;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Subbag di lingkup Bidang Usaha Mikro secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bagian;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bagian masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;

- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir bawahan;
- h. Mengendalikan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka koordinasi di Bidang Usaha Mikro agar berjalan dengan lancar;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bidang Usaha Mikro;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI.2 Pelaksana Fasilitator Promosi

Pelaksana Fasilitator Promosi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menghimpun data pelaku usaha untuk kegiatan pameran atau promosi;
- b. Mencatat data informasi, brosur dari penyelenggara promosi expo;
- c. Mengumpulkan bahan materi pameran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Melaksanakan kegiatan pameran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan promosi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

V. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja Bidang Perindustrian;
- b. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standar dan pengawasan mutu industri kerajinan umum;
- c. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standar dan pengawasan mutu industri makanan dan minuman;
- d. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standar dan pengawasan mutu industri logam, mesin, elektronik dan aneka;
- e. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perindustrian; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

V1. Kepala Bidang

Kepala Bidang Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Subbag di lingkup Bagian Industri secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;

- b. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Subbag di lingkup Bagian Industri secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bagian Industri;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bagian masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- h. Mengendalikan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka koordinasi di Bagian Bidang Industri agar berjalan dengan lancar;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bagian dan Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

V.1 Pelaksana Pemeriksa Industri

Pelaksana Pemeriksa Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Membuat kerangka Acuan Kerja Pemeriksaan Industri sesuai dengan Kondisi Peraturan dan Kebijakan Lingkungan Kabupaten tentang industri secara umum dan industri kerajinan umum secara khusus;
- b. Membuat Standar Operasional Prosedur dalam pemeriksaan industri;
- c. Mencatat informasi dan data industri dalam rangka merumuskan kebijakan dalam pemeriksaan industri;

- d. Mengolah data dan informasi untuk digunakan dalam pemeriksaan industri;
- e. Memeriksa Hak dan Kewajiban Kelengkapan Pelaku Industri sebagai langkah menentukan kebijakan dan bantuan serta fasilitasi kegiatan pengembangan industri dimaksud;
- f. Melayani pelaku IKM dalam kebutuhan akan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan dalam pemeriksaan industri seksi industri kerajinan umum;
- g. Membuat agenda dan menyiapkan bahan rapat koordinasi;
- h. Mengetik bahan serta materi pendukung kegiatan, mendokumentasikan dan mengarsipkan berkas kegiatan;
- i. Mendistribusikan berkas dan dokumen semua tugas yang telah diproses serta melaporkan semua tugas kepada atasan langsung yaitu kepala seksi industri kerajinan umum ;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Perdagangan dan Pasar

Bidang Perdagangan dan Pasar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan rencana program, petunjuk teknis, pelaksanaan program, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan pasar. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang perdagangan dan pasar;
- b. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengolahan data, pengendalian harga sembilan bahan pokok, bahan strategis dan tata niaga perdagangan, pemberian rekomendasi izin usaha dan Surat Keterangan Asal (SKA), serta mengolah data eksportir dan importir, komoditi ekspor dan impor usaha perdagangan;
- c. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengendalian perlindungan konsumen, menyebarluaskan informasi hak-hak dan kewajiban pelaku

usaha serta konsumen, pengelolaan dan pengendalian sarana kemetrolagian;

- d. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyiapan data pedagang dan pengembangan pasar, pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, pemungutan retribusi sewa pasar, pengendalian harga dan operasi pasar; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI.1 Kepala Bidang

Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Merencanakan Program kegiatan di Bidang Perdagangan dan Pasar berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya proses kegiatan Bidang Perdagangan dan Pasar;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Kasi di lingkup Bidang Perdagangan dan Pasar secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Perdagangan dan Pasar;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bagian masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir bawahan;
- h. Mengendalikan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka koordinasi di Bidang Perdagangan dan Pasar agar berjalan dengan lancar;

- i. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bidang Perdagangan dan Pasar;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI.2 Pelaksana Pengelola Fasilitas dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor-Impor

Pelaksana Pengelola Fasilitas dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor-Impor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan usaha perdagangan ekspor;
- b. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan usaha perdagangan impor;
- c. Menyiapkan bahan untuk koordinasi di bidang usaha perdagangan ekspor – impor;
- d. Mengolah data atau bahan untuk bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang usaha perdagangan ekspor-impor;
- e. Menyusun laporan hasil koordinasi, fasilitas dan mediasi di bidang perdagangan ekspor-impor;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang usaha perdagangan ekspor-impor;
- g. Mendokumentasikan dan mengarsipkan berkas kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

VII.1 Perencana Ahli Pertama

Perencana Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- b. Menyiapkan bahan program kegiatan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan;
- c. Memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan bawahan lingkup Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program kepada atasan langsung sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana program yang akan datang; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.2 Pranata Komputer Ahli Pertama

Pranata Komputer Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Mengelola katalog layanan teknologi informasi;
- b. Mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi;
- c. Menyusun alternatif solusi permasalahan pengelolaan data;
- d. Melakukan pengumpulan kebutuhan informasi;
- e. Melakukan perancangan layanan akses data;
- f. Melakukan *backup* atau pemulihan data;
- g. Mengelola pengguna dan hak akses data;
- h. Menyiapkan peralatan *video conference (streaming)*, *monitoring* peralatan berupa audio, video, dan perangkat jaringan, serta mengatur *layout*;
- i. Melakukan instalasi, *upgrade*, dan konfigurasi sistem operasi; dan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.3 Pengawas Koperasi Ahli Muda

Pengawas Koperasi Ahli Muda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana kegiatan Kelembagaan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Kelembagaan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Menyiapkan bahan program kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan;
- e. Melaksanakan kegiatan pada secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;
- f. Memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan bawahan lingkup secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- h. Melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka proses pendirian, penggabungan dan pembubaran koperasi;
- i. Menyiapkan bahan fasilitasi advokasi koperasi;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana program yang akan datang; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.4 Analis Kebijakan Ahli Muda

Analis Kebijakan Ahli Muda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melakukan riset dan analis kebijakan;
- b. Membuat rekomendasi kebijakan;
- c. Melakukan komunikasi, koordinasi advokad, konsultasi dan negosiasi kebijakan;
- d. Melakukan publikasi hasil kebijakan;
- e. Melakukan kegiatan pengembangan kegiatan;
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sehubungan tugas kedinasan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.5 Pengawas Perdagangan Ahli Muda

Pengawas Perdagangan Ahli Muda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menerima, mengklasifikasi dan menyusun surat permintaan rekomendasi di Bidang Perdagangan;
- b. Menyampaikan surat permintaan rekomendasi di bidang perdagangan kepada atasan ;
- c. Mempersiapkan kegiatan yang diperlukan dalam rangka pemberian rekomendasi di bidang perdagangan;
- d. Melakukan pemeriksaan pemenuhan dalam menyusun laporan hasil kegiatan yang dilakukan dalam rangka melengkapi pemberian rekomendasi di bidang perdagangan untuk disampaikan kepada atasan;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi rekomendasi yang telah dan akan diberikan di bidang perdagangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.6 Pengawas Kemetrologian Ahli Muda

Pengawas Kemetrologian Ahli Muda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Perlindungan Konsumen;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan tentang perlindungan konsumen yang meliputi barang dalam keadaan terbungkus, ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen;
- c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Metrologi Legal serta mengambil tindakan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya;
- d. Melakukan pengelolaan dan pengendalian standar ukuran, cap tanda tera, peneraan dan peneraan ulang alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya serta sarana kemetrologian lainnya, dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uu metrologi legal dan uu perlindungan konsumen;
- e. Melakukan pengendalian harga dan operasi pasar;
- f. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan, peredaran dan perdagangan bahan berbahaya (B2);
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.7 Penera Ahli Pertama

Penera Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan administrasi UTP yang akan di tera/tera ulang;
- b. Melakukan pemeriksaan fisik UTP yang akan di tera/tera ulang;
- c. Melakukan pengukuran UTP (Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya);
- d. Melakukan pembubuhan Tanda Tera/Tera Ulang pada UTP yang telah di tera/tera ulang;
- e. Melaporkan tugas kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.8 Penguji Mutu Barang Ahli Pertama

Penguji Mutu Barang Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melaksanakan interpretasi hasil kalibrasi atau hasil uji;
- b. Melakukan Pengujian atau Kalibrasi dengan klasifikasi tingkat kesulitan IV;
- c. Membuat konsep dan mengolah data hasil pengujian atau kalibrasi tingkat kesulitan IV;
- d. Melakukan verifikasi *software* pengolahan data hasil pengujian atau kalibrasi;
- e. Membuat program kalibrasi ulang alat standar atau alat uji;
- f. Melakukan validasi metoda pengujian atau kalibrasi dengan cara menentukan *repeatability*;
- g. Melakukan tindakan perbaikan dan verifikasi hasil penilaian kemampuan teknis dibidang manajemen;
- h. Menindak lanjuti hasil kaji ulang dokumen sistem mutu panduan/prosedur;
- i. Membuat laporan kaji ulang manajemen, Menindak lanjuti hasil kaji ulang manajemen;
- j. Melakukan pengolahan data hasil cek antara kalibrasi; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

VIII.1 Penata Layanan Operasional

Penata Layanan Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengawas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional;
- b. Menyusun rencana layanan operasional;
- c. Menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional;
- d. Melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional;
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII.2 Operator Layanan Operasional

Operator Layanan Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengawas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur;
- b. Mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar/buku kendali untuk tertib administrasi dan memudahkan pencarian;
- c. Mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait;
- d. Menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur;
- e. Mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;
- f. Mengecek kondisi sarana dan prasarana di lingkungan kantor;
- g. Memelihara sarana dan prasarana;
- h. Memberikan layanan permintaan dan peminjaman sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII.3 Pengadministrasi Perkantoran

Pengadministrasi Perkantoran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengawas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi;
- b. Memilah dokumen sesuai dengan jenisnya;
- c. Mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya;
- d. Mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya;
- e. Menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur;
- f. Melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII.4 Pengawas Perdagangan Ahli Pertama

Pengawas Perdagangan Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menerima, mengklasifikasi dan menyusun surat permintaan rekomendasi di Bidang Perdagangan dan Pasar;
- b. Menyampaikan surat permintaan rekomendasi di bidang perdagangan kepada atasan;
- c. Mempersiapkan kegiatan yang diperlukan dalam rangka pemberian rekomendasi di Bidang Perdagangan dan Pasar;
- d. Melakukan pemeriksaan pemenuhan, menyusun laporan hasil kegiatan yang dilakukan dalam rangka melengkapi pemberian rekomendasi di Bidang Perdagangan dan Pasar untuk disampaikan kepada atasan;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi rekomendasi yang telah dan akan diberikan di Bidang Perdagangan dan Pasar; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 ada beberapa isu penting yang menyangkut dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Jumlah UMKM tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 jumlah sebanyak 8.310 UMKM, tahun 2021 sebanyak 8.498 UMKM dan tahun 2022 menjadi 8.698 UMKM, tahun 2023 menjadi 8.783 dan tahun 2024 menjadi 8.983 sehingga terjadi peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 673 UMKM (8.09%).

Sedangkan untuk perkembangan tenaga kerja yang dapat diserap oleh UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2020–2024 juga meningkat, dimana jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM pada tahun 2020 sebanyak 10.268 orang, tahun 2021 menjadi 10.501 orang, tahun 2022 menjadi 8.698 orang, tahun 2023 menjadi 10.896 orang dan pada akhir tahun 2024 menjadi sebanyak 11.195 orang, sehingga terjadi peningkatan tenaga kerja dari tahun 2020-2024 sebanyak 927 orang (9.02%).

Terkait sektor Pemberdayaan Koperasi, perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2017 berjumlah 368 koperasi, yang terdiri dari 133 koperasi aktif dan 236 koperasi tidak aktif. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pembubaran koperasi tidak aktif sebanyak 116 koperasi, sehingga terjadi penurunan jumlah koperasi. Pada tahun 2020 jumlah koperasi sebanyak 268 koperasi yang terdiri dari koperasi aktif sebanyak 151 koperasi dan koperasi tidak aktif sebanyak 117 koperasi, tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah koperasi sebanyak 6 koperasi dari 268 koperasi menjadi 274 koperasi yang terdiri dari koperasi aktif sebanyak 159 koperasi dan koperasi tidak aktif sebanyak 115 koperasi. Pada tahun 2022 jumlah koperasi bertambah 1 koperasi sehingga menjadi 275 koperasi. Pada tahun 2023 jumlah koperasi menjadi 285 koperasi dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 300 koperasi, Dimana koperasi aktif berjumlah 185 koperasi dan koperasi tidak aktif berjumlah 115 koperasi.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi berkaitan dengan faktor ekonomi, faktor sumberdaya manusia, manajemen usaha, keterbatasan akses pada jaringan dan peluang kerjasama, serta masih adanya kepentingan pribadi yang memanfaatkan keberadaan koperasi. Dari sisi faktor ekonomi, karena adanya keterbatasan akses terhadap modal secara tidak langsung membawa dampak terhadap sulitnya memperoleh bahan baku dan terhambatnya proses pemasaran.

Dari sisi internal Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terbatasnya SDM yang memiliki pemahaman dan

keterampilan dibidang-bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus diantaranya petugas penyuluh koperasi. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pembinaan koperasi terutama bagi koperasi baru berdiri. Disamping itu seringnya mutasi pegawai antar SKPD menjadi salah satu kendala pengkaderan. Kerjasama antar lintas sektoral terutama bagi SKPD yang saling terkait belum optimal, sehingga pembinaan baik dalam bentuk penyuluhan, pendampingan teknis dan manajemen usaha masih kurang. Sulitnya akses permodalan bagi KUMKM terutama pelaku KUMKM pemula terhadap lembaga keuangan yang ada dalam mengembangkan usahanya.

Berikut disajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung jabung Barat sebagai berikut :

1. Umum

- Masih kurangnya SDM yang memiliki keahlian kompetensi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya
- Masih kurangnya Staf ASN pada setiap Bidang untuk membantu pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya
- Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan
- Terbatasnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan pelaksanaan Program dan kegiatan

2. Koperasi dan UMKM

- Masih banyak terdapat koperasi yang tidak aktif, dikarenakan tidak adanya usaha koperasi dan kurangnya kemampuan pengurus/pengelola koperasi dalam mengembangkan usaha koperasi
- Rendahnya pengawasan dari internal koperasi terhadap pengelolaan keuangan koperasi
- Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus dalam penyusunan laporan keuangan koperasi
- Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Akses pembiayaan, produktivitas dan daya saing masih rendah
- Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang manfaat dan keunggulan koperasi sebagai sarana perekonomian
- Reformasi total untuk mengubah stigma KUMKM sebagai gerakan ekonomi zaman dahulu menjadi modern dan tangguh
- Keterbatasan UMKM menguasai teknologi digital dan masih banyak UKM menggunakan alat-alat manual dalam memproduksi produk-produk UKM
- Data Usaha Mikro Kecil belum semuanya terinput dalam program SIKP (Sistem Informasi Kredit Program)

3. Industri

- Strukturisasi permesinan sarana pendukung industri dan peningkatan SDM dalam pemanfaatan bahan baku lokal potensi daerah, sehingga mampu berkompetensi dengan produk daerah lain
- Kurang tersedianya infrastruktur untuk membentuk kawasan industri/ sentra industri yang tepat
- SDM IKM yang terampil masih minim
- Rendahnya kreativitas dan inovasi pelaku IKM
- Berkurangnya minat para pelaku industri skala kecil dan mikro untuk mengurus perizinan usaha.
- Terkendala dengan persyaratan untuk mengurus izin
- Belum terpetakannya kawasan/sentra industri dengan baik, baik skala kecil, menengah dan besar.
- Pendirian lokasi usaha IKM tidak sesuai dengan tata ruang
- Masih kurangnya SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;
- Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan;

4. Perdagangan

- Terbatasnya Revitalisasi dan penguatan pasar rakyat serta penerapan tertib ukur dalam meningkatkan aktivitas perdagangan dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat
- Belum tersedianya System Resi Gudang (SRG) dalam pengamanan, ketercukupan barang kebutuhan pokok
- Belum terbentuknya UPTD Metrologi Legal
- Terbatasnya kewenangan pengawasan barang yang beredar
- Ketidaknormalan distribusi kebutuhan barang pokok dan barang penting
- Permasalahan produktivitas, pemasaran, dan kondisi ekonomi
- Rendahnya kesadaran pelaku usaha ekspor menyampaikan laporan
- Masih rendahnya nilai pemungutan retribusi pasar

Adapun Isu-isu Strategis yang menjadi perhatian Kabupaten Tanjung Jabung Barat, antara lain :

1. Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Akses Pembiayaan, Produktivitas, daya saing dan SDM Koperasi dan UMKM.

2. Reformasi total untuk mengubah stigma KUMKM sebagai gerakan ekonomi zaman dahulu menjadi modern dan tangguh.
3. Revitalisasi dan penguatan pasar rakyat, penerapan tertib ukur serta ketersediaan System Resi Gudang (SRG) dalam meningkatkan aktivitas perdagangan dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat.
4. Strukturisasi permesinan sarana pendukung industri dan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan bahan baku lokal potensi daerah, sehingga mampu berkompetensi dengan produk daerah lain.
5. Penyediaan infrastruktur untuk mencetak atau membentuk kawasan/sentra industri yang tepat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan matrik pokok yang telah disusun dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/propinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan Rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Koperasi, UKM, Perindustriaan dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tidak berbeda.
2. Rumusan program dan kegiatan yang terdapat dirancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok beserta besarannya.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ORGANISASI / OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	9,802,686,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	9,802,686,000	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja		5 Dokumen, 4 Laporan	142,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja		5 Dokumen, 4 Laporan	142,000,000	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	5 Dokumen	87,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	5 Dokumen	87,000,000	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	4 Laporan	55,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	4 Laporan	55,000,000	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah		2 laporan/12 bulan	5,860,110,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah		2 laporan/12 bulan	5,860,110,000	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	36 orang/bulan	5,554,354,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	36 orang/bulan	5,554,354,000	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Dokumen	301,166,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Dokumen	301,166,000	
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	4,590,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	4,590,000	
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD		12 bulan	39,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD		12 bulan	39,000,000	
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 bulan	39,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 bulan	39,000,000	
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya kepegawaian yang administratif		12 Bulan	200,260,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya kepegawaian yang administratif		12 Bulan	200,260,000	
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	1 Paket	95,320,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	1 Paket	95,320,000	
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	8 orang	104,940,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	8 orang	104,940,000	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan kantor		12 bulan	1,832,253,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan kantor		12 bulan	1,832,253,000	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	2 Paket	55,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	2 Paket	55,000,000	
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	4 Paket	190,050,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	4 Paket	190,050,000	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Paket	13,962,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Paket	13,962,000	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	1 Paket	41,053,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	1 Paket	41,053,000	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Dokumen	34,688,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Dokumen	34,688,000	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	1,497,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	1,497,500,000	
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang barang milik daerah		100%	257,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang barang milik daerah		100%	257,000,000	
2	17	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya			-	Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya			-

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya		-	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya		-	
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	Laptop (3 unit), AC (2 unit), Printer (3 unit)	257,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	Laptop (3 unit), AC (2 unit), Printer (3 unit)	257,000,000	
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan kantor		12 bulan	522,063,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan kantor		12 bulan	522,063,000	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	26,234,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	26,234,000	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	279,841,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	279,841,000	
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	181,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	181,000,000	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	34,988,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	34,988,000	
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		12 bulan, 1 gedung	950,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		12 bulan, 1 gedung	950,000,000	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	29 Unit	515,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	29 Unit	515,000,000	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	22 Unit	85,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	22 Unit	85,000,000	
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	1 Unit	350,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	1 Unit	350,000,000	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi simpan pinjam yang memiliki izin		15.18%	100,000,000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi simpan pinjam yang memiliki izin		15.18%	100,000,000	
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentasi fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk KSP/USP		15.18%	100,000,000	Penerbitan Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentasi fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk KSP/USP		15.18%	100,000,000	
						Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas KSP/USP		10.60%			Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas KSP/USP		10.60%		

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	13 Unit Usaha	100,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	13 Unit Usaha	100,000,000	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan yang patuh terhadap Perundang-undangan		100%	355,000,000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan yang patuh terhadap Perundang-undangan		100%	355,000,000	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Kepatuhan Koperasi		100%	355,000,000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Kepatuhan Koperasi		100%	355,000,000	
2	17	03	2.01	01	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	268 Unit Usaha	135,000,000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	268 Unit Usaha	135,000,000	
2	17	03	2.01	02	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Kab. Tanjung Jabung Barat	268 Unit Usaha	220,000,000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Kab. Tanjung Jabung Barat	268 Unit Usaha	220,000,000	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya		100%	150,500,000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya		100%	150,500,000	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Persentase Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP		100%	150,500,000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Persentase Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP		100%	150,500,000	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Tanjung Jabung Barat	79 Unit Usaha	150,500,000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Tanjung Jabung Barat	79 Unit Usaha	150,500,000	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mendapat pelatihan		22.38%	305,000,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mendapat pelatihan		22.38%	305,000,000	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi	Persentase Terlaksananya pelatihan bagi koperasi		60 orang	150,000,000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang	Persentase Terlaksananya pelatihan bagi koperasi		60 orang	150,000,000	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Tanjung Jabung Barat	60 Orang	150,000,000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Tanjung Jabung Barat	60 Orang	150,000,000	
2	17	05	2.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UKM		26 orang	155,000,000	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UKM		26 orang	155,000,000	
2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Kab. Tanjung Jabung Barat	26 Orang	155,000,000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Kab. Tanjung Jabung Barat	26 Orang	155,000,000	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Koperasi aktif		5.6%	1,220,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Koperasi aktif		5.6%	1,220,000,000	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah	Meningkatnya persentase koperasi aktif		5.6%	1,220,000,000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah	Meningkatnya persentase koperasi aktif		5.6%	1,220,000,000	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi aktif	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Koperasi	1,220,000,000	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi aktif	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Koperasi	1,220,000,000	
						Jumlah Koperasi yang mendapat		25 Koperasi			Jumlah Koperasi yang mendapat		25 Koperasi		
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan UMKM		2.40%	3,820,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan UMKM		2.40%	3,820,000,000	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro ynnng dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Perijinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan Jumlah UMKM		2.40%	3,820,000,000	Pemberdayaan Usaha Mikro ynnng dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Perijinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan Jumlah UMKM		2.40%	3,820,000,000	

KODE						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	17	07	2.01	01		Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	200 Unit Usaha	300,000,000	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	200 Unit Usaha	300,000,000	
2	17	07	2.01	02		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Unit Usaha	200,000,000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Unit Usaha	200,000,000	
2	17	07	2.01	03		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Unit Usaha	110,000,000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Unit Usaha	110,000,000	
2	17	07	2.01	04		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan	Kab. Tanjung Jabung Barat	80 Unit Usaha	910,000,000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan	Kab. Tanjung Jabung Barat	80 Unit Usaha	910,000,000	
2	17	07	2.01	05		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Tanjung Jabung Barat	100 Unit Usaha	2,300,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Tanjung Jabung Barat	100 Unit Usaha	2,300,000,000	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil		3.33%	325,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil		3.33%	325,000,000	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Kecil	Persentase Tercapainya Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil		3.33%	325,000,000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Kecil	Persentase Tercapainya Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil		3.33%	325,000,000	
2	17	08	2.01	01	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Tanjung Jabung Barat	35 Unit Usaha	325,000,000	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Tanjung Jabung Barat	35 Unit Usaha	325,000,000	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)		10.83%	130,000,000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)		10.83%	130,000,000	
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Fasilitasi penerbitan izin		10.83%	130,000,000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Fasilitasi penerbitan izin		10.83%	130,000,000	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Tanjung Jabung Barat	250 Dokumen	130,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Tanjung Jabung Barat	250 Dokumen	130,000,000	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar yang layak dan berfungsi		4.17%	6,200,000,000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar yang layak dan berfungsi		4.17%	6,200,000,000	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pelaksanaan pembangunan dan Rehabilitasi pasar		4.17%	5,000,000,000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pelaksanaan pembangunan dan Rehabilitasi pasar		4.17%	5,000,000,000	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tanjung Jabung Barat	4 Unit	5,000,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tanjung Jabung Barat	4 Unit	5,000,000,000	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase Pelaksanaan Pembinaan, dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		13,88% dan 6,94%	1,200,000,000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase Pelaksanaan Pembinaan, dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		13,88% dan 6,94%	1,200,000,000	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Dokumen	550,000,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Dokumen	550,000,000	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tanjung Jabung Barat	5 Dokumen	650,000,000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tanjung Jabung Barat	5 Dokumen	650,000,000	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terwujudnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		18 Jenis Barang	1,240,000,000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terwujudnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		18 Jenis Barang	1,240,000,000	
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya			540,000,000	Menjamin Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya			540,000,000	
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Laporan	540,000,000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Laporan	540,000,000	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengawasan barang kebutuhan pokok dan Barang kebutuhan penting lainnya		18 Jenis Barang	500,000,000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengawasan barang kebutuhan pokok dan Barang kebutuhan penting lainnya		18 Jenis Barang	500,000,000	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	48 Laporan	500,000,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	48 Laporan	500,000,000	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi		5 Jenis pupuk	200,000,000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi		5 Jenis pupuk	200,000,000	
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Laporan	200,000,000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Laporan	200,000,000	
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor		5%	1,325,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor		5%	1,325,000,000	
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas		5%	1,325,000,000	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas		5%	1,325,000,000	
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kab. Tanjung Jabung Barat	4 Pelaku Usaha	300,000,000	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kab. Tanjung Jabung Barat	4 Pelaku Usaha	300,000,000	
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Tanjung Jabung Barat	8 Pelaku Usaha	400,000,000	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Tanjung Jabung Barat	8 Pelaku Usaha	400,000,000	
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Pelaku Usaha	325,000,000	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Pelaku Usaha	325,000,000	
3	30	05	2.01	06	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Pelaku Usaha	300,000,000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Pelaku Usaha	300,000,000	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN	Persentase UTTP yang tertib dan akurat		49.82%	1,050,000,000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN	Persentase UTTP yang tertib dan akurat		49.82%	1,050,000,000	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		49.82%	1,050,000,000	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		49.82%	1,050,000,000	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.150 unit	800,000,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.150 unit	800,000,000	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Tanjung Jabung Barat	150 orang	250,000,000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Tanjung Jabung Barat	150 orang	250,000,000	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah promosi/pemasaran produk dalam daerah		20 UMKM	200,000,000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah promosi/pemasaran produk dalam daerah		20 UMKM	200,000,000	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan	Terlaksananya promosi/pemasaran produk dalam daerah		20 UMKM	200,000,000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk	Terlaksananya promosi/pemasaran produk dalam daerah		20 UMKM	200,000,000	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	20 UMKM	200,000,000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	20 UMKM	200,000,000	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN	Persentase Peningkatan Jumlah		2.82%	1,360,000,000	PROGRAM PERENCANAAN DAN	Persentase Peningkatan		2.82%	1,360,000,000	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil		2.82%	1,360,000,000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil		2.82%	1,360,000,000	
3	31	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam rangka mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah Perda dan Perbup terkait Kebijakan Industri	Kab. Tanjung Jabung Barat			- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam rangka mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah Perda dan Perbup terkait Kebijakan Industri	Kab. Tanjung Jabung Barat			-

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan	Kab. Tanjung Jabung Barat	40 Dokumen	570,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan	Kab. Tanjung Jabung Barat	40 Dokumen	570,000,000	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Tanjung Jabung Barat	7 Dokumen	200,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Tanjung Jabung Barat	7 Dokumen	200,000,000	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Barat	40 Dokumen	500,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Barat	40 Dokumen	500,000,000	
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Dokumen	90,000,000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Dokumen	90,000,000	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase industri yang memiliki izin		10.34%	150,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase industri yang memiliki izin		10.34%	150,000,000	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas penerbitan izin industri		10.34%	150,000,000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas penerbitan izin industri		10.34%	150,000,000	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan atau dalam Rangka Perluasan Usaha Untuk Bidang Usaha dengan resiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi , Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kab. Tanjung Jabung Barat	3 Dokumen	150,000,000	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan atau dalam Rangka Perluasan Usaha Untuk Bidang Usaha dengan resiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi , Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kab. Tanjung Jabung Barat	3 Dokumen	150,000,000	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Terwujudnya pengelolaan sistem informasi industri nasional		43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Terwujudnya pengelolaan sistem informasi industri nasional		43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100,000,000	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi industri		43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100,000,000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi industri		43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100,000,000	
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan	Kab. Tanjung Jabung Barat	43 Dokumen	50,000,000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data	Kab. Tanjung Jabung Barat	43 Dokumen	50,000,000	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Dokumen	50,000,000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Dokumen	50,000,000	
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Tanjung Jabung Barat	43 Dokumen	50,000,000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Tanjung Jabung Barat	43 Dokumen	50,000,000	
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Dokumen	50,000,000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Dokumen	50,000,000	
						Jumlah			27,833,186,000		Jumlah			27,833,186,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan kegiatan teknis mengembangkan, membina dan memfasilitasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Pasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih bersifat koordinatif dengan SKPD baik vertikal maupun horizontal, sehingga usulan masyarakat baik langsung maupun melalui Forum Musrenbang terkait dengan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dapat diakomodir dengan baik.

Forum OPD merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Kegiatan Musrenbang Kecamatan dengan OPD, serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh OPD terkait.

Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah Forum OPD. Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial.

Dalam forum ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrenbang Kecamatan dengan Draf Rencana Kerja OPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan acara forum OPD untuk menghimpun dan mensinergikan usulan-usulan kegiatan, baik yang berasal dari *Bottom up* maupun *Top down*. Setelah dilakukan analisis kesesuaian usulan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat semuanya memiliki kesamaan, sehingga dimungkinkan dapat dilaksanakan sepenuhnya apabila mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Proses selanjutnya, usulan-usulan tersebut kemudian di skala prioritas berdasarkan tingkat ketersediaan pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan masyarakat. Adapun usulan yang terkait kepada OPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari hasil

Musrenbang Kecamatan dan POKIR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026 yang perlu untuk ditindaklanjuti sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ALASAN	KETERANGAN/USULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. Bantuan UMKM	UMKM Mawar Putih RT 05 Kel. Kampung Nelayan, Kec. Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.
2.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. Bantuan UMKM	UMKM Anggrek RT 05 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.
3.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. Bantuan UMKM dan Pelatihan Keterampilan	Kelompok Yasinan Ibu-Ibu "Az-Zahrah" RT 04 Desa Pematang Lumut, Kec. Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. H. Abdullah, SE
4.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. Pembinaan/ Pelatihan Kelompok Pembatik (UKM)	Desa Brasau, Kec. Tungkal Ulu, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. H. Fahrizal, S.Pd
5.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. Pengadaan Mesin Jahit untuk KKWT	Desa Delima, Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Sutejo
6.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. Bantuan Mesin Jahit untuk KKWT	Desa Delima Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Sutejo
7.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. Bantuan untuk UMKM Bagi Pedagang Kecil	Desa Kuala Dasal, Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Sutejo
8.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. Bantuan UMKM	Kec. Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Muhammad Zaki, ST
9.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. Pengadaan Mesin Jahit	Ibu PKK RT.10 - RT.14 Desa Bram Itam Kanan, Kec. Bram Itam, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Endri Avian
10.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. Pengadaan Peralatan Pembuatan Kue	Ibu PKK RT.10 - RT.14 Desa Bram Itam Kanan, Kec. Bram Itam, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Endri Avian

11.	Pemeliharaan dan Penyediaan PSU skala Kawasan Perumahan dan permukiman (Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), Ruang Terbuka Hijau (RTH), jembatan dan Jalan lingkungan). Mohon di tambah pangkalan gas di Desa Sungai Saren, Karena Pangkalan yang ada hanya satu tempat	Jalan Lintas Tungkal Jambi, Desa Sungai Saren RT 11 Kel. Bram Itam Kiri, Kec. Bram Itam, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Siti Maidina Herdiyanti
12.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. Penambahan Modal Bagi Ibu-Ibu Pengusaha UMKM	Lorong Tegal Ireng, RT.05, RT.19 dan RT.10, Kel. Patunas Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Siti Maidina Herdiyanti
13.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. Permohonan bantuan UMKM di Kel. Kampung Nelayan	Kelurahan Kampung Nelayan, RT 09, RT 10, RT 13, RT 14 dan RT 02, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Siti Maidina Herdiyanti
14.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. Permohonan Bantuan UMKM untuk Kelompok Usaha Desa Tungkal I	Desa Tungkal I, RT.01, RT.07,RT.11 dan RT.13, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Siti Maidina Herdiyanti
15.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. Permohonan Bantuan UMKM di Kel. Tungkal Harapan	Kelurahan Tungkal Harapan, RT 11, RT 19 dan RT 13 Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Siti Maidina Herdiyanti
16.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. UMKM (Pengembangan Makanan Tahu dan Tempe)	RT 09 Desa Brasau Kec. Tungkal Ulu (An. M. Toha), Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Jayus
17.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. UMKM (Pengembangan Jamur Tiram)	Jalan Manggis RT. 30 Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi (An. Suwanto/Semiati)Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Usulan diteruskan ke Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Jayus
18.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. UMKM (Pengembangan Makanan Tahu)	RT.16 KM.1 Desa Teluk Pengkah Kec. Tebing Tinggi (An. M. Imam Khanafi) Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Jayus
19.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. UMKM (Pengembangan Makanan Tempe)	RT.16 KM.1 Desa Teluk Pengkah Kec. Tebing Tinggi (An. Ana Mahzumah) Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Jayus
20.	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota. Pembangunan Pasar Kantin Permanen Cor Beton Volume 45 x 5 meter	RT. 10 Kelurahan Betara Kiri, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Usulan diteruskan ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Albert Chaniago

21.	Pelatihan Kewirausahaan (Perluasan Kesempatan Kerja) Untuk Masyarakat. UMKM untuk IRT/Menambah Penghasilan Keluarga	RT 02 Kel. Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Usulan diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Melda Arisandi, S.Kom
22.	Pelatihan Kewirausahaan (Perluasan Kesempatan Kerja) Untuk Masyarakat. Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat yang sangat minim UMKM	RT 04 Kel. Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Usulan diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Melda Arisandi, S.Kom
23.	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota. Optimalisasi Bangunan Pasar di lapangan TKD yang Mangkrak dan salah sasaran	RT 04 Kel. Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Melda Arisandi, S.Kom
24.	Pelatihan Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Skala Diklat (BLK). UMKM untuk ibu rumah tangga	RT. 03 Desa Kelagian, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Usulan diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Melda Arisandi, S.Kom
25.	Pelatihan Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Skala Diklat (BLK). Permohonan NIB dan Penambahan modal pelaku UMKM	Desa Lampisi, Kec. Renah Mendaluh, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Usulan diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Yetno
26.	Pelatihan Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Skala Diklat (BLK), Permohonan Pengadaan keterampilan UMKM untuk lansia	Desa Tanjung Benanak Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Usulan diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Yetno
27.	Pelatihan Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Skala Diklat (BLK). Permintaan bantuan modal usaha untuk pelaku UMKM	Desa Cinta Damai, Kec. Renah Mendaluh, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Usulan diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Yetno
28.	Pelatihan Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Skala Diklat (BLK). Pelatihan usaha	Desa Adipurwa, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Usulan diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Dudi Purwadi
29.	Pelatihan Kewirausahaan (Perluasan Kesempatan Kerja) Untuk Masyarakat. Pengadaan Mesin Bordir	Desa Adipurwa, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Dudi Purwadi
30.	Pelatihan Kewirausahaan (Perluasan Kesempatan Kerja) Untuk Masyarakat. Pengadaan Mesin Jahit	Desa Adipurwa, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Dudi Purwadi
31.	Pengembangan Sember Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pengadaan Alat Cetak Sablon	Desa Adipurwa, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Usulan diteruskan ke Disarpورا Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Dudi Purwadi

32.	Pelatihan Kewirausahaan (Perluasan Kesempatan Kerja) Untuk Masyarakat. Pelatihan Membatik	Dalam wilayah Kec. Batang Asam, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Pokir Anggota DPRD An. Dedy Irawan
33.	Penyediaan, Peningkatan serta Pemeliharaan Pasar. Kantin Pasar 1 Paket (Prioritas)	Dusun Panglima Haji Baslan, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Usulan Musrenbang Kec. Tungkal Ilir An. Yani
34.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. Pelatihan Desain Batik TP.PKK Kelurahan Teluk Nilau	JL. Tarmum RT.05 Teluk Nilau, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Usulan Musrenbang Kel. Teluk Nilau, Kec. Pengabuan
35.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. Pelatihan Kursus Menjahit TP. PKK Kelurahan Teluk Nilau (10 orang)	JL.Tarmum RT.05 Teluk Nilau , Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Usulan diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat	Usulan Musrenbang Kel. Teluk Nilau, Kec. Pengabuan
36.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. Peningkatan untuk bengkel motor 30 orang	Desa Sungai Serindit, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Usulan diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat	Usulan Musrenbang Kec. Pengabuan An. M.Saman
37.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. Bantuan Sarana Prasarana Usaha Konveksi Bumdes Gerbang Nusantara	Jl. Merdeka RT 06, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Usulan diteruskan ke Dinas PMD Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat	Usulan Musrenbang Kec. Tebing Tinggi An. Asbar N
38.	Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM. Pelatihan Menjahit (Cadangan)	RT 07, Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Kegiatan	Usulan diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat	Usulan Musrenbang Kec. Bram Itam An. M. Angsori, S.Pd.I
39.	Pengerasan Jalan Akses ke Pasar Volume 100m x 4m. Penyediaan Peningkatan Serta Pemeliharaan Pasar	Dusun Betara 8 RT 04, Desa Terjun Gajah, Kab. Tanjung Jabung Barat.	1 Kegiatan	Usulan diteruskan ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat	Usulan Musrenbang Kec. Betara An. Anto Hasibuan
40.	Pembuatan Saung/Lapak Pasar untuk Masyarakat berjualan di pasar volume 20m x 5m	Dusun Betara 8 RT 04, Desa Terjun Gajah, Kab. Tanjung Jabung Barat.	1 Kegiatan	Usulan diteruskan ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat	Usulan Musrenbang Kec. Betara An. Anto Hasibuan
41.	Pelatihan membatik guna untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan di desa. Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM	Desa Terjun Gajah, Kab. Tanjung Jabung Barat.	1 Kegiatan	Diakomodir di Dinas Kopperindag Kab. Tanjung Jabung Barat	Usulan Musrenbang Kec. Betara An. Anto Hasibuan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan perangkat daerah yang berperan penting dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah. Dinas ini memiliki visi *“Terwujudnya Koperasi, Industri, dan Perdagangan yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing”*, yang selaras dengan visi pembangunan lima tahunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu *“Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”*. Selain itu, Diskoperindag juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian misi BERKAH, khususnya melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dari desa hingga kota secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
2. Mewujudkan Kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Menumbuh kembangkan Semangat Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan Industri yang bertumpu pada Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan pemanfaatan penerapan teknologi yang tersedia;
5. Terwujudnya tatanan dan sarana perdagangan yang baik sebagai pendorong ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan misi tersebut, terdapat tujuan jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2029, yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah, serta Meningkatkan Kualitas Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Produk Unggulan Daerah yang Berdaya Saing, serta Industri Kecil dan Menengah yang Berkualitas.

Disisi lain, sasaran pembangunan merupakan hasil yang ingin dicapai untuk memenuhi tujuan tersebut dengan tetap berpedoman pada prioritas nasional, prioritas daerah, dan dinamika strategis yang dihadapi. Adapun sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi:

1. Meningkatkan Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
2. Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Industri Kecil dan Menengah; dan
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat kinerja koperasi dan UMKM, daya saing produk unggulan daerah, serta kualitas industri kecil dan menengah, sehingga dapat mendukung pencapaian visi pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Program dan Kegiatan

Selain Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pengentasan Kemiskinan

Program dan Kegiatan di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama beberapa tahun terakhir termasuk kedalam Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Koperasi, UMKM dan IKM sebagai salah satu dari soko guru perekonomian diharapkan dapat menumbuhkan etos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah (One Village One Product), melatih dan mengusahakan modal bagi komponen masyarakat untuk menjadi enterpreneur, yang akhirnya akan bermuara pada peningkatkan ekonomi rumah tangga pada khususnya dan ekonomi rakyat pada umumnya. Dengan meningkatnya perekonomian rakyat diharapkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat semakin menurun.

2. Pengembangan potensi ekonomi daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki banyak potensi daerah antara lain : potensi dibidang industri kecil, perikanan, pertanian, perkebunan, dll. Potensi-potensi tersebut harus dikembangkan agar dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada khususnya dan perekonomian Provinsi Jambi pada umumnya. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan kedudukan, tugas dan fungsi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat 55 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha

Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran penting dalam pengembangan potensi ekonomi daerah melalui pembinaan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan cara, antara lain :

- a. Memberi pemahaman masyarakat akan pentingnya selalu giat bekerja, dalam konteks bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas.
- b. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas masyarakat dalam berinovasi untuk membangun dan mengembangkan usaha, serta bentuk-bentuk ekonomi kreatif lainnya, berbasis ekonomi kerakyatan.
- c. Membantu masyarakat dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan dalam menghadapi perubahan, persaingan dan kompleksitas permasalahan di masa depan.
- d. Bekerjasama dengan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing tangguh, berjiwa entrepreneurship dan mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan pembangunan daerah.
- e. Mendorong peningkatan partisipasi publik dan kemandirian masyarakat dalam berbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, minimal kebutuhan pokoknya.

Adapun Rencana Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
8. Program Pengembangan UMKM
9. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
11. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
12. Program Pengembangan Ekspor
13. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
14. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
15. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
16. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota
17. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Usulan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan secara rinci sebagaimana tertuang dalam BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	9.802.686.000			100%	11.177.698.000
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja		5 Dokumen, 4 Laporan	142.000.000				142.000.000
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	5 Dokumen	87.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		5	87.000.000
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	4 Laporan	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	55.000.000
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah		2 laporan/12 bulan	5.860.110.000				5.860.110.000
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	36 orang/ bulan	5.554.354.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	5.554.354.000
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Dokumen	301.166.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	301.166.000
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	4.590.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	4.590.000
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD		12 bulan	39.000.000				39.000.000
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 bulan	39.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	39.000.000
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya kepegawaian yang administratif		12 Bulan	200.260.000				200.260.000

2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	1 Paket	95.320.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	95.320.000
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	8 orang	104.940.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	104.940.000
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan kantor		12 bulan	1.832.253.000				1.832.253.000
2	17	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	2 Paket	55.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	55.000.000
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	4 Paket	190.050.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	190.050.000
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Paket	13.962.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	13.962.000
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	1 Paket	41.053.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	41.053.000
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Dokumen	34.688.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	34.688.000
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	1.497.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	1.497.500.000
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang barang milik daerah		100%	257.000.000				957.000.000
2	17	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya		-	Dana Alokasi Umum (DAU)		5	200.000.000
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya		-	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	500.000.000
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	Laptop (3 unit), AC (2 unit), Printer (3 unit)	257.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		16	257.000.000

2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan kantor		12 bulan	522.063.000				1.197.075.000
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	26.234.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	26.234.000
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	279.841.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	279.841.000
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	181.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	181.000.000
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	34.988.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	710.000.000
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		12 bulan, 1 gedung	950.000.000				950.000.000
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	29 Unit	515.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		30	515.000.000
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	22 Unit	85.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		25	85.000.000
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	1 Unit	350.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	350.000.000
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi simpan pinjam yang memiliki izin		15,18%	100.000.000				0
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentasi fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk KSP/USP		15,18%	100.000.000				0
						Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas KSP/USP		10,60%					
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	13 Unit Usaha	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	0

2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan yang patuh terhadap Perundang-undangan		100%	355.000.000			100%	355.000.000
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Kepatuhan Koperasi		100%	355.000.000				355.000.000
2	17	03	2.01	01	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	268 Unit Usaha	135.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		80	135.000.000
2	17	03	2.01	02	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Kab. Tanjung Jabung Barat	268 Unit Usaha	220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		80	220.000.000
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya		100%	150.500.000			0	0,00
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP		100%	150.500.000				0
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Tanjung Jabung Barat	79 Unit Usaha	150.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	0
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mendapat pelatihan		22,38%	305.000.000			22,38%	160.000.000
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya pelatihan bagi koperasi		60 orang	150.000.000				160.000.000
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Tanjung Jabung Barat	60 Orang	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		54	160.000.000
2	17	05	2.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UKM		26 orang	155.000.000				0
2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Kab. Tanjung Jabung Barat	26 Orang	155.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		0	0

2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Koperasi aktif		5,6%	1.220.000.000			20,55%	150.000.000
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya persentase koperasi aktif		5,6%	1.220.000.000				150.000.000
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi aktif	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Koperasi	1.220.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		37	150.000.000
						Jumlah Koperasi yang mendapat bantuan pendanaan		25 Koperasi		Dana Alokasi Umum (DAU)			
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan UMKM		2,40%	3.820.000.000			2,41%	4.015.000.000
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro ynng dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Perijinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan Jumlah UMKM		2,40%	3.820.000.000				4.015.000.000
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Unit Usaha	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		10	200.000.000
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Unit Usaha	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		10	110.000.000
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	Kab. Tanjung Jabung Barat	80 Unit Usaha	910.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		80	910.000.000
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Tanjung Jabung Barat	100 Unit Usaha	2.300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100	2.340.000.000
2	17	07	2.01	07	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kab. Tanjung Jabung Barat	200 Unit Usaha	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		200	300.000.000
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-			26	155.000.000

2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil		3,33%	325.000.000			3,88%	700.000.000
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Kecil	Persentase Tercapainya Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil		3,33%	325.000.000				700.000.000
2	17	08	2.01	01	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Tanjung Jabung Barat	35 Unit Usaha	325.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		110	700.000.000
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)		10,83%	130.000.000			10,86%	130.000.000
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Fasilitasi penerbitan izin		10,83%	130.000.000				130.000.000
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Tanjung Jabung Barat	250 Dokumen	130.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		20	130.000.000
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar yang layak dan berfungsi		4,17%	6.200.000.000			4,30%	6.200.000.000
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pelaksanaan pembangunan dan Rehabilitasi pasar		4,17%	5.000.000.000				5.000.000.000
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tanjung Jabung Barat	4 Unit	5.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		6	5.000.000.000
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase Pelaksanaan Pembinaan, dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		13,88% dan 6,94%	1.200.000.000				1.200.000.000
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Dokumen	550.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		10	550.000.000
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tanjung Jabung Barat	5 Dokumen	650.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		5	650.000.000

3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terwujudnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		18 Jenis Barang	1.240.000.000			6,69%	1.890.000.000
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya			540.000.000				540.000.000
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Laporan	540.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	540.000.000
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengawasan barang kebutuhan pokok dan Barang kebutuhan penting lainnya		18 Jenis Barang	500.000.000				1.150.000.000
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	48 Laporan	500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		48	500.000.000
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-			4	650.000.000
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi		5 Jenis pupuk	200.000.000				200.000.000
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Laporan	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	200.000.000
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor		5%	1.325.000.000			3%	1.325.000.000
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas		5%	1.325.000.000				1.325.000.000
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kab. Tanjung Jabung Barat	4 Pelaku Usaha	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	300.000.000
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Tanjung Jabung Barat	8 Pelaku Usaha	400.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	400.000.000
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Pelaku Usaha	325.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		10	325.000.000

3	30	05	2.01	06	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Pelaku Usaha	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		3	300.000.000
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP yang tertib dan akurat		49,82%	1.050.000.000			100%	1.050.000.000
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		49,82%	1.050.000.000				1.050.000.000
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.150 unit	800.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		300	800.000.000
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Tanjung Jabung Barat	150 orang	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		30	250.000.000
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah promosi/pemasaran produk dalam daerah		20 UMKM	200.000.000			7,3%	215.000.000
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya promosi/ pemasaran produk dalam daerah		20 UMKM	200.000.000				215.000.000
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	20 UMKM	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		20	215.000.000
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil		2,82%	1.360.000.000				1.810.000.000
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil		2,82%	1.360.000.000			2,82%	1.810.000.000
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		-	-			1	200.000.000
3	31	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam rangka mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah Perda dan Perbup terkait Kebijakan Industri	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-			1	100.000.000
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Tanjung Jabung Barat	40 Dokumen	570.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	570.000.000

3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Tanjung Jabung Barat	7 Dokumen	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	200.000.000
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Tanjung Jabung Barat	40 Dokumen	500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	500.000.000
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Dokumen	90.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	90.000.000
3	31	02	2.01	08	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-			1	150.000.000
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase industri yang memiliki izin		10,34%	150.000.000			10,34%	225.000.000
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas penerbitan izin industri		10,34%	150.000.000				225.000.000
3	31	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-			1	75.000.000
3	31	03	2.01	02	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan atau dalam Rangka Perluasan Usaha Untuk Bidang Usaha dengan resiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi , Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kab. Tanjung Jabung Barat	3 Dokumen	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	150.000.000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Terwujudnya pengelolaan sistem informasi industri nasional		43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100.000.000			1	150.000.000
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi industri		43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100.000.000				150.000.000
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Tanjung Jabung Barat	43 Dokumen	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	50.000.000
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Dokumen	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	100.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Mengacu pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Tahun 2021-2026 serta faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka disusunlah Rumusan Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 sebagaimana pada Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) berikut pada tabel 4.1 :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Keterangan
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	9.802.686.000	
2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		5 Dokumen, 4 Laporan	142.000.000	
2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	5 Dokumen	87.000.000	
2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	4 Laporan	55.000.000	
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah		2 laporan/12 bulan	5.860.110.000	
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	36 orang/ bulan	5.554.354.000	
2 17 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Dokumen	301.166.000	
2 17 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	4.590.000	
2 17 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD		12 bulan	39.000.000	
2 17 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 bulan	39.000.000	
2 17 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya kepegawaian yang administratif		12 Bulan	200.260.000	
2 17 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	1 Paket	95.320.000	
2 17 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	8 orang	104.940.000	
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan kantor		12 bulan	1.832.253.000	
2 17 01 2.06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	2 Paket	55.000.000	
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	4 Paket	190.050.000	
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Paket	13.962.000	
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	1 Paket	41.053.000	

KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Keterangan
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Dokumen	34.688.000	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	1.497.500.000	
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang barang milik daerah		100%	257.000.000	
2	17	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya			
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya			
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	Laptop (3 unit), AC (2 unit), Printer (3 unit)	257.000.000	
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan kantor		12 bulan	522.063.000	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	26.234.000	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	279.841.000	
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	181.000.000	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	12 Laporan	34.988.000	
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		12 bulan, 1 gedung	950.000.000	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	29 Unit	515.000.000	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	22 Unit	85.000.000	
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Tungkal Ilir Kel. Sriwijaya	1 Unit	350.000.000	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi simpan pinjam yang memiliki izin		15,18%	100.000.000	
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk KSP/USP		15,18%	100.000.000	
						Persentase fasilitas penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas		10,60%		

KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Keterangan
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	13 Unit Usaha	100.000.000	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan yang patuh terhadap Perundang-undangan		100%	355.000.000	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Kepatuhan Koperasi		100%	355.000.000	
2	17	03	2.01	01	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	268 Unit Usaha	135.000.000	
2	17	03	2.01	02	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Kab. Tanjung Jabung Barat	268 Unit Usaha	220.000.000	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya		100%	150.500.000	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP		100%	150.500.000	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Tanjung Jabung Barat	79 Unit Usaha	150.500.000	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mendapat pelatihan		22,38%	305.000.000	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya pelatihan bagi koperasi		60 orang	150.000.000	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Tanjung Jabung Barat	60 Orang	150.000.000	
2	17	05	2.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UKM		26 orang	155.000.000	
2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Kab. Tanjung Jabung Barat	26 Orang	155.000.000	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Koperasi aktif		5,6%	1.220.000.000	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya persentase koperasi aktif		5,6%	1.220.000.000	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi aktif Jumlah Koperasi yang mendapat bantuan pendanaan	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Koperasi 25 Koperasi	1.220.000.000	

KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Keterangan
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan UMKM		2,40%	3.820.000.000	
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yning dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Perijinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan Jumlah UMKM		2,40%	3.820.000.000	
2 17 07 2.01 01	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	200 Unit Usaha	300.000.000	
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Unit Usaha	200.000.000	
2 17 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Unit Usaha	110.000.000	
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	Kab. Tanjung Jabung Barat	80 Unit Usaha	910.000.000	
2 17 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Tanjung Jabung Barat	100 Unit Usaha	2.300.000.000	
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil		3,33%	325.000.000	
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Kecil	Persentase Tercapainya Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil		3,33%	325.000.000	
2 17 08 2.01 01	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Tanjung Jabung Barat	35 Unit Usaha	325.000.000	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)		10,83%	130.000.000	
3 30 02 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Fasilitasi penerbitan izin		10,83%	130.000.000	
3 30 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Tanjung Jabung Barat	250 Dokumen	130.000.000	

KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Keterangan
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar yang layak dan berfungsi		4,17%	6.200.000.000	
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pelaksanaan pembangunan dan Rehabilitasi pasar		4,17%	5.000.000.000	
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tanjung Jabung Barat	4 Unit	5.000.000.000	
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase Pelaksanaan Pembinaan, dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		13,88% dan 6,94%	1.200.000.000	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Dokumen	550.000.000	
3 30 03 2.02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tanjung Jabung Barat	5 Dokumen	650.000.000	
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terwujudnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		18 Jenis Barang	1.240.000.000	
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya			540.000.000	
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Laporan	540.000.000	
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengawasan barang kebutuhan pokok dan Barang kebutuhan penting lainnya		18 Jenis Barang	500.000.000	
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	48 Laporan	500.000.000	
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi		5 Jenis pupuk	200.000.000	
3 30 04 2.03 02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Laporan	200.000.000	
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor		5%	1.325.000.000	
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas		5%	1.325.000.000	
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kab. Tanjung Jabung Barat	4 Pelaku Usaha	300.000.000	
3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Tanjung Jabung Barat	8 Pelaku Usaha	400.000.000	
3 30 05 2.01 04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Pelaku Usaha	325.000.000	
3 30 05 2.01 06	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Pelaku Usaha	300.000.000	

KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Keterangan
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang tertib dan akurat		49,82%	1.050.000.000	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		49,82%	1.050.000.000	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.150 unit	800.000.000	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Tanjung Jabung Barat	150 orang	250.000.000	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah promosi/pemasaran produk dalam daerah		20 UMKM	200.000.000	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya promosi/ pemasaran produk dalam daerah		20 UMKM	200.000.000	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	20 UMKM	200.000.000	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil		2,82%	1.360.000.000	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil		2,82%	1.360.000.000	
3	31	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam rangka mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah Perda dan Perbup terkait Kebijakan Industri	Kab. Tanjung Jabung Barat			
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Tanjung Jabung Barat	40 Dokumen	570.000.000	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kab. Tanjung Jabung Barat	7 Dokumen	200.000.000	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	Kab. Tanjung Jabung Barat	40 Dokumen	500.000.000	
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Dokumen	90.000.000	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Industri yang memiliki Izin		10,34%	150.000.000	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi penerbitan izin industri		10,34%	150.000.000	
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan atau dalam Rangka Perluasan Usaha Untuk Bidang Usaha dengan resiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kab. Tanjung Jabung Barat	3 Dokumen	150.000.000	

KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output Compe), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output Pot)	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Keterangan
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Paga Indikator (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Terwujudnya pengelolaan sistem informasi industri nasional		43 RMB / 10 Buku Profil IKM	100.000.000	
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUS, IPSI, IKI dan IPK-Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersevidanya data dan informasi industri		43 RMB / 10 Buku Profil IKM	100.000.000	
3 31 04 2.01 01	Facilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Tanjung Jabung Barat	43 Dokumen	50.000.000	
3 31 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Dokumen	50.000.000	
		Jumlah			27.833.186.000	



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan mengembangkan, membina dan memfasilitasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun 2026 mendatang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026 dapat kami susun dengan harapan rencana kerja ini bisa memberikan dorongan motivasi dalam pencapaian sasaran kinerja pembangunan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sehingga dapat mewujudkan Koperasi dan UMKM yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Kuala Tungkal, Februari 2026

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


SAWALUDDIN F. TANJUNG, SE, M.S.I

Pembina Tk.I

NIP. 19780506 201101 1 001